



IMPLIKASI STRATEGIS TRAKTAT PERTAHANAN AUSTRALIA-PAPUA NUGINI TERHADAP INDONESIA

Devindra Ramkas Oktaviano*

Abstrak

Traktat Pertahanan Bersama Australia–Papua Nugini yang ditandatangani pada 6 Oktober 2025 mencerminkan perubahan arsitektur keamanan di Kepulauan Pasifik yang menunjukkan kecenderungan menuju pola aliansi formal. Traktat ini memperkuat integrasi militer kedua negara melalui mekanisme respons bersama, penguatan kapabilitas, serta pemanfaatan fasilitas dan dukungan pertahanan Papua Nugini oleh angkatan bersenjata Australia. Tulisan ini menguraikan ketentuan-ketentuan dari traktat tersebut yang perlu dicermati dan kemudian menjelaskan implikasinya secara bilateral maupun regional. Meskipun tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Indonesia, implementasi perjanjian ini memerlukan kewaspadaan terhadap transparansi operasi militer Australia di Papua Nugini serta potensi implikasinya bagi stabilitas kawasan Kepulauan Pasifik seiring dengan menguatnya rivalitas strategis Australia–Tiongkok. Komisi I DPR RI perlu meminta pemerintah mencermati perkembangan pelaksanaan traktat tersebut, dan mengaktifkan diplomasi pertahanan dengan kedua negara untuk menjaga dan membangun saling percaya di antara ketiga pihak.

Pendahuluan

Australia dan Papua Nugini (PNG), dua negara tetangga Indonesia, baru saja menandatangani perjanjian pertahanan bersama (*mutual defence treaty*) di Canberra, Australia, pada Senin, 6 Oktober 2025 (Dziedzic, 2025). Kesepakatan bilateral yang dinamakan sebagai Traktat Pukpuk ini memuat berbagai kerja sama penguatan kapabilitas dan interoperabilitas pertahanan kedua negara. Salah satu butir perjanjian yang disoroti adalah pengakuan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu pihak merupakan ancaman bagi keduanya dan karenanya dapat diambil tindakan bersama untuk mengatasi ancaman bersama tersebut. Perjanjian ini kini tengah menunggu ratifikasi dari kedua belah pihak.

Tulisan ini akan menguraikan lebih lanjut butir-butir kesepakatan kedua belah pihak dan memetakan implikasi strategis yang perlu dicermati Indonesia baik di tingkat bilateral

*) Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: devindra.oktaviano@dpr.go.id.

maupun regional Kepulauan Pasifik. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi sumber kepustakaan Komisi I DPR RI untuk mendukung fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri dan pertahanan terhadap negara dan kawasan yang berbatasan dengan Indonesia.

Konteks Historis dan Substansi Perjanjian

Australia dan Papua Nugini memiliki sejarah panjang kerja sama pertahanan yang terus berkembang. Hubungan ini dimulai pada 26 Januari 1977 melalui *Agreement between Australia and Papua New Guinea Regarding the Status of Forces of Each State in the Territory of the Other State*, kemudian diperkuat oleh *Defence Cooperation Arrangement* yang mulai berlaku 10 Mei 2013 dan diperbarui pada 22 April 2015 lewat *Arrangement Concerning the Provision of Mutual Logistic Support*. Taraf kerja sama kedua negara meningkat lebih lanjut dengan *Agreement on a Framework for Closer Security Relations* yang berlaku sejak 12 Desember 2024. Dalam peringatan 50 tahun kemerdekaannya pada 16 September 2025, Papua Nugini mengusulkan peningkatan hubungan dengan Australia menjadi aliansi. Usulan tersebut dituangkan dalam *Joint Communiqué* yang ditandatangani pada 17 September 2025 dan memuat kesepakatan untuk menyiapkan traktat pertahanan bersama berisi lima prinsip utama kerja sama. Kelima prinsip tersebut kemudian diadopsi ke dalam naskah Traktat Pukpuk, meskipun terminologi “Alliance” tidak lagi digunakan dalam dokumen final.

Komitmen pertahanan bersama (*mutual defence*) Australia–Papua Nugini tertuang utamanya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Traktat Pukpuk. Pasal 4 mengatur mekanisme respons terhadap ancaman keamanan kedua negara. Ayat 2 mewajibkan kedua pihak berkonsultasi bila terjadi perkembangan yang berpotensi mengancam kedaulatan, perdamaian, atau stabilitas salah satu pihak, guna mempertimbangkan langkah penanganannya. Ayat 3 menegaskan komitmen bertindak bersama menghadapi ancaman militer, dengan menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu pihak di Kawasan Pasifik dianggap sebagai ancaman bagi keduanya. Kedua negara sepakat merespons bersama sesuai mekanisme konstitusional masing-masing.

Kegiatan kerja sama pertahanan (*defence cooperation*) antara kedua negara selanjutnya diatur melalui Pasal 5. Kerja sama pertahanan mencakup di antaranya pertukaran dan penempatan personel, latihan bersama bilateral dan multilateral, peningkatan interoperabilitas, serta operasi bersama saat krisis atau konflik. Kerja sama ini meliputi lintas domain (darat, laut, udara, siber, antariksa), pengembangan kemampuan, berbagi intelijen, sinkronisasi logistik dan industri pertahanan, pembangunan infrastruktur militer, hingga rekrutmen warga negara ke angkatan bersenjata pihak lain. Pasal 6 mengatur status, yurisdiksi, dan tanggung jawab hukum kehadiran personel militer kedua negara di wilayah satu sama lain. Pasal 7 mengatur akses dan penggunaan fasilitas serta wilayah yang disepakati di Papua Nugini oleh angkatan bersenjata Australia, termasuk pengamanan fasilitas, penggunaan kontraktor, dan pengelolaan peralatan militer. Klausul-

klausul pada traktat ini menunjukkan kedekatan dan kepercayaan strategis tinggi antara Australia dan Papua Nugini, karena memberi dasar hukum bagi penempatan pasukan, pemanfaatan infrastruktur, dan integrasi logistik dalam kerangka kerja sama bilateral berkelanjutan.

Dalam rilis medianya, PM Australia, Anthony Albanese menyampaikan pada tahapan pertama implementasi traktat tersebut, warga negara Papua Nugini yang tinggal dan menjadi penduduk tetap di Australia dapat mendaftar menjadi tentara Australia (*Australian Defence Force/ADF*) (Department of the Prime Minister and Cabinet, 2025). Australia juga akan memutakhirkan fasilitas di Goldie River Training Depot di Port Moresby, penyediaan senapan tempur buatan Australia, dan pelatihan bagi awak pesawat angkatan bersenjata PNG (minister.defence.gov.au, 2025).

Implikasi Strategis terhadap Indonesia dan Kawasan

Traktat Pukpuk memberikan Australia akses atas fasilitas dan personel militer PNG sebagai ganti atas manfaat ekonomi dan pemberdayaan yang diperoleh PNG (Sasingian, 2025) melalui integrasi yang komprehensif antar unsur pertahanan dengan Australia. Melihat realitas bahwa PNG berbatasan darat dengan Indonesia sepanjang 840 km, perjanjian ini dapat memberi kesempatan untuk militer Australia semakin dekat dengan perbatasan Indonesia (Keary & Hughes, 2025). Perdana Menteri PNG, James Marape, mengakui hal tersebut dalam pernyataannya bahwa perbatasan Indonesia-PNG menjadi isu yang sensitif terhadap Traktat Pukpuk (Zarriga, 2025). Pemerintah Indonesia melalui keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kepada ABC News mengemukakan pihaknya terus memantau perkembangan perjanjian tersebut dan mengharapkan Australia dan PNG untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan, serta memastikan agar kerja sama keduanya berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan, termasuk mencegah peningkatan persaingan geopolitik (Souisa & Renaldi, 2025).

Australia sudah berupaya mengkomunikasikan kebijakan strategis tersebut dengan Indonesia. Pada 5 Juni 2025, Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, menyampaikan rencana perjanjian tersebut kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta (Aditya & Damarjati, 2025). Panglima ADF, Laksamana David Johnston, menyampaikan pasca pertemuannya dengan Menhan Sjafrie Sjamsoedin pada 17 Oktober 2025 bahwa mereka berpegang erat pada komitmen menghormati kedaulatan Indonesia seperti yang tertuang dalam Perjanjian Lombok dan Traktat Pukpuk akan membuka peluang kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia (Riswan, 2025).

Traktat Pukpuk sebenarnya terbentuk di tengah tren penguatan hubungan bilateral pertahanan Indonesia dengan kedua negara. Indonesia dan Australia menandatangani *Defence Cooperation Agreement* pada 29 Agustus 2025. Pada 7 Juli 2025 Indonesia dan Papua Nugini sudah memperbincangkan percepatan implementasi *Defence Cooperation Agreement* yang sudah diratifikasi oleh keduanya (antaranews.com, 2025).

Implikasi lain yang layak mendapat perhatian strategis adalah potensi eskalasi rivalitas geopolitik Australia dan Tiongkok di kawasan Kepulauan Pasifik. Traktat ini muncul dalam konteks meningkatnya kekhawatiran Australia terhadap pengaruh Tiongkok yang kian luas di negara-negara kepulauan Pasifik. Orientasi Australia untuk menangkal pengaruh Tiongkok tidak dapat dipungkiri, apalagi sejak 2018 Australia mempersepsikan kehadiran Tiongkok di Kepulauan Pasifik sebagai ancaman (Wallis et al., 2022, p. 522). Traktat ini memastikan Tiongkok tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pertahanan PNG seperti yang sudah dicapai Tiongkok di negara-negara lainnya di Kepulauan Pasifik. Hal ini menjelaskan mengapa Tiongkok menanggapi traktat ini secara negatif (Faa, 2025).

Penutup

Traktat Pertahanan Bersama Australia–Papua Nugini mencerminkan adanya perkembangan arsitektur keamanan di kawasan Kepulauan Pasifik yang menegaskan kecenderungan pola aliansi formal. Dua hal yang harus dicermati oleh Indonesia adalah pengerahan dan operasi militer Australia di wilayah Papua Nugini, terutama jika mengarah ke perbatasan dengan Indonesia, dan dampak kolateral dari kemungkinan menguatnya kompetisi geopolitik di kawasan.

Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Luar Negeri untuk memonitor perkembangan pelaksanaan traktat tersebut, termasuk mendorong komunikasi yang intensif dengan para pihak perjanjian. Komisi 1 DPR RI juga dapat merekomendasikan Kementerian Pertahanan untuk mengefektifkan diplomasi pertahanan dengan kedua negara di tengah momentum implementasi *Defence Cooperation Agreement*.

Referensi

- Aditya, N. R., & Damarjati, D. (2025, June 5). RI dukung Australia jalin kerja sama pertahanan dengan Papua Nugini. *kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/05/14170221/ri-dukung-australia-jalin-kerja-sama-pertahanan-dengan-papua-nugini>
- antaranews.com. (2025, July 8). Indonesia, Papua New Guinea eye stronger defense ties. *AntaraNews*. <https://en.antaranews.com/news/364949/indonesia-papua-new-guinea-eye-stronger-defense-ties>
- Department of the Prime Minister and Cabinet. (2025, October 6). Australia and Papua New Guinea sign Mutual Defence Treaty. Prime Minister of Australia. <https://www.pm.gov.au/media/australia-and-papua-new-guinea-sign-mutual-defence-treaty>
- Dziedzic, S. (2025, October 6). “Our nearest neighbour is our newest ally”: Albanese, Marape sign new defence treaty. *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2025-10-06/australia-png-sign-defence-treaty-of-mutual-alliance/105858244>

- Faa, M. (2025, September 19). China responds to Australia's defence treaty with PNG. *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2025-09-19/china-warns-papua-new-guinea-against-bilateral-deal-australia/105794018>
- Keary, J., & Hughes, M. (2025, October 7). What to expect from Australia–PNG defence treaty. *ASPI*. <https://www.aspistrategist.org.au/what-to-expect-from-australia-png-defence-treaty/>
- minister.defence.gov.au. (2025, October 20). Defence Ministers' Joint Statement—PNG-Australia Mutual Defence Treaty Implementation. Defence Ministers of Australian Government. <https://www.minister.defence.gov.au/statements/2025-10-20/defence-ministers-joint-statement-png-australia-mutual-defence-treaty-implementation>
- Riswan, K. K. (2025, October 17). Perjanjian Australia–PNG buka peluang kerja sama dengan Indonesia. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/5181321/perjanjian-australia-png-buka-peluang-kerja-sama-dengan-indonesia>
- Sasingian, S. (2025, October 20). The Pukpuk Treaty is a defence deal PNG's youth can prosper from. *Lowy Institute*. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/pukpuk-treaty-defence-deal-png-s-youth-can-prosper>
- Souisa, H., & Renaldi, E. (2025, October 9). Indonesia urges respect for its sovereignty after Australia-PNG defence treaty. *ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2025-10-10/indonesia-responded-pukpuk-defence-agreement-australia-png/105869738>
- Wallis, J., Ireland, A., Robinson, I., & Turner, A. (2022). Framing China in the Pacific Islands. *Australian Journal of International Affairs*, 76(5), 522–545. <https://doi.org/10.1080/10357718.2022.2063252>
- Zarriga, M. (2025, October 13). PM Marape: PNG–Indonesia border remains a sensitive issue amid Defence Pact with Australia. *Post Courier*. <https://www.postcourier.com.pg/pm-marape-png-indonesia-border-remains-a-sensitive-issue-amid-defence-pact-with-australia/>